

3 ANALISIS ARTIKEL MEDIA MASSA

1. Kegagalan Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Dana Desa

1. Identitas Artikel/ Media Massa	
Judul berita	Korupsi Dana Desa Rp721 juta, kdes di Tulung Agung masuk Bui.
Sumber	Detikjatim
Tanggal Kejadian	September 2024 (penahanan tersangka)
subjek	Suratman (kades tambakrejo, Tulung Agung)
Ringkasan Kasus	Kasus ini melbatkan kepala desa tambakrejo yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi Dana desa tahun anggaran 2020-2022. Berdasarkan audit inspektorat, kerugian negara mencapai 721 juta. Modus operasinya meliputi pembuatan proyek pembangunan fiktif, penyalahgunaan tanah kas desa, hingga manipulasi penyertaan modal BUMDes. Tersangka ini dijatuhi hukam 4 tahun dan denda 200 juta oleh hakim. Dan jika beliau tidak bisa membayar denda maka akan mendapat tambahan hukuman selama 6 bulan. Beliau pun dalam menjalankan aksi tidak sendiri yaitu bersama rekannya yang mendapatkan hukuman pula selama 1 tahun 9 bulan dan dengan denda 50 juta.
Analisis Kritis	
1. Manipulasi Laporan & proyek Fiktif	Kades memebuat laporans eolah-olah ada pembangunan, padahal fisiknya tidak ada. Dalam Akuntansi Sektor Publik (ASP), hal ini adlaah pelanggaran fatal terhadap prinsip Verifikasi. Adanya proyek fiktif menunjukan bahwa proses SPJ (surat Pertanggung Jawaban) desa ini hanya formalitas. Sehauhnya, pencairan dana tahap berikutnya tidak bisa dilakukan jika laporan fisik tahap sebelumnya belum diverifikasi oleh tim pelaksana dan diketahui BPD.
2. Penyelewengan Modal BUMDes	Dana desa dsalurkan ke BUMDes sebagai penyertaan modal tapi uangnya malah digunakan untuk keperluan

	pribadi. Penyertaan modal BUMDes seharusnya didasarkan pada Analisis Kelayakan Bisnis. Jika uang bisa keluar begitu saja tanpa aktivitas bisnis yang jelas, berarti tidak ada pemisahan kekuasaan antara kades sebagai penasihat BUMDes dan Direktur BMDes. Dan hal ini melanggar <i>Segregation of Duties</i>
3. kerugian negara	Kerugian 721 juta untuk ukuran desa adalah angka yang sangat besar. Fakta bahwa korupsi ini berjalan selama 3 tahun yaitu dari tahun 2020 sampai 2022 tanpa terdeteksi lebih awal menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan Inspektorat Daerah dan BPD setempat.

2. Transformasi Aset Tidur Menjadi Pendapatan Asli Desa (PADesa) melalui BUMDes (desa Sekapuk)

1. Identitas Artikel/ Media Massa	
Judul berita	Deklarasikan diri sebagai desa Miliarder, ini sumber kekayaan desa sekapuk
Sumber	Jelajah Ekonomi Desa
Tanggal Kejadian	16 Mei 2023
Subjek	Desa Sekapuk
Ringkasan Berita	Desa sekapuk itu dulunya adalah desa tertinggal dan kumuh, namun berhasil mendeklarasikan diri sebagai "Desa Miliarder" keberhasilan ini di dorong oleh BUMDes yang menulap bekas tambang kapus menjadi desa destinasi wisata "Setigi". Hasilnya desa mampu menyumbangkan PADesa hingga miliaran rupiah, membuka lapangan kerja, dan memberikan beasiswa serta bantuan sosial bagi warga dari keuntungan sendiri, bukan dasri da transfer pusat. Selain itu juga ada 5 pendapatan lain yang menjadi pendapatan desa tersebut yaitu usaha multijasa (transaksi keuangan transfer, pembayaran listrik, air, dan pengisian

	pulsa melalui BUMDes), kerajinan batu putih, unit kebersihan dan U-Sport.
2. Analisis Kritis	
1. Optimalisasi Aset tetap	Dalam ASP, aset pemerintah seringkali menganggur. Namun desa Sekapuk membuktikan konsep <i>Value Creation</i> . Mereka melakukan revaluasi aset bekas tambang dan menyuntikkan modal untuk mengubahnya menjadi aset produktif yang menghasilkan Pendapatan yang berulang atau <i>Recurring Income</i>
2. pergeseran struktur pendapatan desa melalui kemandirian fiskal	Keberhasilan desa sekapuk ini mengubah struktur APBDes mereka. Jika desa lain 70-90% pendapatannya bergantung pada dana transfer pusat, tapi desa Sekapuk ini berhasil meningkatkan porsi PADes secara signifikan. Hal ini adalah indikator tertinggi kesehatan keuangan sektor publik yaitu kemandirian financial desa.
3. akuntabilitas kinerja	Laba BUMDes yang besar dibagikan kembali ke masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi di sektor publik bukan soal mencari untung semata saja , tetapi soal kesejahteraan publik. Laporan keuangannya tansparan karena hasilnya dirasakan langsung oleh warga seperti beasiswa, bantuan sosial, mobil operasional, dll.

3. Tuntutan Transparansi Publik Dan Kegagalan Komunikasi Anggaran (Kasus Demo Desa Manggungan)

1. Identitas Artikel/ Media Massa	
Judul berita	Tuntutan trasnparansi Dana Desa, Warga Demo Balai Desa Manggungan Indramayu
Sumber	Kompas.com
Tanggal Kejadian	28 Okt 2025
subjek	Transparansi dan akuntabilitas publik
Ringkasan Kasus	Warga melakukan aksi unjuk rasa menuntut transparansi penggunaan dana desa yang dinilai tertutup. Ketidakjelasan realisasi anggaran dan

	minimnya sosialisasi mengenai proyek-proyek desa memicu ketidakpercayaan publik. Warga menuntut hak mereka untuk mengetahui kemana aliran dana publik tersebut digunakan.
Analisis Kritis	
1. teori keagenan	Konflik ini adalah contoh nyata masalah keagenan di sektor publik. Masyarakat sebagai prinsipal merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup dari penrangkat desa sebagai agen atau pengelola. Terjadi asimetri informasi, dimana pemerintah desa mengetahui detail anggaran, sementara warga buta. Demo adalah respons ekstrem ketika saluran pelaporan formal macet dan tindak ditanggapi dan diesekusi dengan baik.
2. pelanggaran Asas transparansi	Dalam pengelolaan keuangan desa, transparansi adalah asas mutlak. Tidak cukup hanya lapor ke Bupati, desa wajib mempublikasikan APBDesa dan LRA di ruangan publik yang mudah diakses. Jika warga sampai harus mendemo balai desa, berarti mekanisme publikasi tidak berjalan atau sengaja disembunyikan.
3. Peran sosial audit	Alsi warga dalam demo ini adalah bentuk audit sosial informal. Dalam akuntansi sektor publik modern, pengawasan bukan hanya oleh inspektorat internal atau BPK sebagai eksternal, tapi juga masyarakat. Ketertutupan informasi keuangan adalah lampu kuning sebagai indikator awal potensi terjadinya kecurangan.

3 ANALISA JURNAL NASIONAL

Jurnal Nasional 1 (Fraud/Kecurangan)

1. Identitas Jurnal

Judul	Analisis Fraud Diamond Theory Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak
Penulis	Mukhlis Adi Putra dan Nugroho Tulus Rahayu
Instutusi	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang
Jenis Publikasi	Prosiding Seminar Nasional Publikasi Hasil-Hasil Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Tahun Terbit	2019-2020
Metode Penelitian	Kuantitatif dengan metode survey berbasis kuesioner
Populasi Dan sampel	Seluruh perangkat desa di Kecamatan Guntur, sampel diperoleh menggunakan quota sampling (153 responden)
Teori	Fraud Diamond Theory (Pressure, Opportunity, Rationalization, Capability)

2. Hasil Analisis

Pendahuluan	Pada bagian pendahuluan, penulis menjelaskan konteks pentingnya Dana Desa di Indonesia dan peningkatan anggaran dari tahun ke tahun yang berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan dana desa juga membawa risiko terjadinya kecurangan akibat penyalahgunaan wewenang. Penulis kemudian menegaskan bahwa Fraud Diamond Theory digunakan sebagai dasar menganalisis empat faktor penyebab fraud yaitu Pressure (Tekanan), Opportunity (Kesempatan), Rationalization (Rasionalisasi), Capability (Kemampuan pelaku)
Hasil Dan Pembahasan	Hasil menunjukkan bahwa faktor internal berupa rasionalisasi dan kemampuan pelaku (jabatan/otoritas) lebih berpengaruh terhadap fraud* dibandingkan faktor tekanan dan kesempatan. Artinya, fraud lebih mudah terjadi Ketika Pengawasan tidak efektif dan Pelaku memiliki kedudukan

	tinggi dalam organisasi, Sebaliknya, meskipun transparansi dan audit meningkat, hal itu belum tentu dapat mendeteksi atau mencegah fraud jika pelakunya masih memiliki kuasa dan pemberaran pribadi.
Kelebihan	<ul style="list-style-type: none"> • Fraud Diamond jarang diterapkan pada konteks dana desa, sehingga penelitian ini memberikan perspektif baru. • Menggunakan regresi, uji validitas dan reliabilitas mendukung kekuatan data. • Kasus korupsi dana desa marak sehingga penelitian bernilai praktis bagi pemerintah daerah. • Responden langsung pelaku pengelolaan dana desa, sehingga data bersifat empiris dan aktual.
Kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak pertanyaan bernada negatif sehingga responden enggan menjawab jujur. • Hal ini membuat rujukan kurang formal untuk sitasi akademik. • Tidak ada wawancara/observasi sehingga tidak menggali faktor perilaku secara mendalam. • Hanya berlaku pada Kecamatan Guntur, tidak untuk seluruh desa di Indonesia.

Jurnal Nasional 2 (Partisipasi Publik, Transparansi/Sistem)

1. Identitas Jurnal

Judul	Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa
Penulis	Rina Sulistyowati & Rita Nataliawati
Institusi	Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan
Jurnal	Owner: Riset & Jurnal Akuntansi
Volume	Vol. 6, No. 2
Tahun Terbit	April 2022
ISSN	e--ISSN: 2548-9224 • p-ISSN: 2548-7507
Metode Penelitian	Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus
	Pengelolaan Dana Desa di Desa Mojoranu, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro

2. Hasil Analisis

Pendahuluan	Pada bagian pendahuluan, penulis mengangkat fenomena adanya penyelewengan dana desa di Mojoranu dan beberapa desa lain sebagai latar belakang pentingnya penelitian ini. Faktor penyebab utama yang disebutkan adalah Rendahnya transparansi, Minimnya partisipasi Masyarakat, Kelemahan penerapan fungsi akuntabilitas. Penulis juga mendukung latar belakang dengan data kasus korupsi serta teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa topik penelitian relevan dan berbasis masalah nyata.
Tinjauan Pustaka	Penulis menyajikan beberapa konsep utama yaitu Pengelolaan dana desa, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat. Selain itu, penulis membandingkan penelitian sebelumnya melalui tabel studi terdahulu untuk menunjukkan posisi penelitian ini dalam gap riset.
Hasil	Hasil penelitian dibagi dalam 3 aspek utama:

	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas <p>Pengelolaan keuangan telah mengikuti prosedur sesuai Permendagri 113 Tahun 2014. Dokumen administrasi seperti buku kas, buku bank, dan laporan pertanggungjawaban tersedia. Penatausahaan menggunakan aplikasi SIP Desa dan Siskeudes. Disimpulkan bahwa akuntabilitas sudah berjalan baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transparansi <p>Terdapat upaya transparansi melalui papan pengumuman, rapat musyawarah, dan website. Namun, website tidak diperbarui dan akses publik terhadap laporan masih terbatas. Transparansi dinilai belum maksimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi Masyarakat berjalan tetapi tidak merata.
--	---

Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengangkat kasus aktual terkait korupsi dana desa. • Studi kasus sesuai untuk menggali praktik tata kelola dana desa • Memakai wawancara multi-informan sehingga temuan lebih kuat. • Menggunakan dasar hukum jelas, Rujukan Permendagri, regulasi desa, dan teori governance.
Kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh hasil berbasis persepsi tanpa dukungan angka statistik. • Fokus hanya satu desa, sehingga tidak merepresentasikan daerah lain • Tidak ada table ringkas atau skor penilaian kategori tiap indikator. • Tidak ada rekomendasi kebijakan yang mendalam <p>Kesimpulan kurang memberikan solusi teknis untuk perbaikan desa penelitian.</p>

	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Mojoranu akuntabel dan prosedural, namun masih terdapat kelemahan pada aspek transparansi public dan pengawasan masyarakat. Partisipasi warga berjalan tetapi belum optimal dan cenderung pasif pada tahap monitoring.
--	---

Jurnal Nasional 3 (BUMdes/Sukses)

1. Identifikasi Publik

Judul	Analisis Kinerja Keuangan BUMDes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi
Penulis	Lidwina Fanny E.P., Agnes Susana Merry P., dan Imelda Sinaga
Institusi	STIE Gentiaras Bandar Lampung
Jurnal	Jurnal Akuntansi Kompetitif
Volume	Vol. 5 No. 1
Tahun Terbit	Januari 2022
Metode Penelitian	Deskriptif kuantitatif
Objek Penelitian	BUMDes Desa Banjar Sari (tahun 2019–2020)
Data yang Dipakai	Laporan keuangan (neraca & laporan laba rugi)

2. Hasil Analisis

Pendahuluan	Pada pendahuluan, jurnal menjelaskan Pemerintah membentuk BUMDes untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa. Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap BUMDes, terutama pada sektor wisata dan penyewaan jasa karena pembatasan aktivitas. Data menunjukkan hanya 10.600 dari 37.000 BUMDes aktif selama pandemi, menunjukkan penurunan drastis aktivitas usaha. Penulis juga mengangkat penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil beragam
-------------	--

	terkait keberhasilan BUMDes di berbagai daerah sebagian berjalan baik, sebagian tidak optimal.
Hasil	<p>Data yang dianalisis adalah laporan keuangan BUMDes Banjar Sari tahun 2019 (pra pandemi) dan 2020 (ketika pandemi).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas (ROA) meningkat selama pandemi, menunjukkan kemampuan menghasilkan laba tetap baik meskipun usaha terhambat. • Likuiditas (Current Ratio) tinggi, menunjukkan BUMDes memiliki kemampuan sangat baik memenuhi kewajiban jangka pendek. • Solvabilitas (DAR) memburuk drastis, menunjukkan ketergantungan terhadap utang semakin tinggi, risiko finansial meningkat. • Total Asset Turnover rendah dan menurun, menandakan aset tidak dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan pendapatan. <p>Hal ini menunjukkan BUMDes masih mampu bertahan selama pandemi, namun masih kurang efisien dalam memanfaatkan aset dan mengelola hutang.</p>
Kelebihan	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas dampak pandemi COVID-19 terhadap BUMDes yang merupakan isu aktual. • Analisis kinerja berdasarkan aturan pemerintah No. 06/Per/M.KUKM/V/2006, sehingga hasil lebih kredibel. • Menggunakan data laporan keuangan aktual BUMDes Banjar Sari, sehingga tidak hanya teori. • Menggunakan rasio keuangan yang mudah dibandingkan antartahun.

Kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil hanya deskriptif, sehingga tidak dapat menguji pengaruh atau signifikansi antar variabel. • Membuat analisis tren jangka panjang kurang kuat. • Faktor sosial, kebijakan pemerintah, dan model bisnis BUMDes tidak dianalisis. • Membatasi generalisasi kesimpulan untuk BUMDes lain.
Kesimpulan	<p>Jurnal ini memberikan gambaran bahwa meskipun pandemi memberi dampak besar, BUMDes Banjar Sari masih memiliki kinerja keuangan yang baik dari sisi likuiditas dan profitabilitas, namun perlu perbaikan dalam pemanfaatan aset dan pengelolaan solvabilitas.</p>

2 ANALISA JURNAL INTERNASIONAL

1. Identitas Jurnal

Judul	Accountability and Transparency in Public Sector Accounting: A Systematic Review
Penulis	Ratna Sari & Muslim
Institusi	Universitas Muslim Indonesia, Makassar
Jurnal	Amkop Management Accounting Review (AMAR)
Volume	Vol. 3, No. 2, Tahun 2023, Hal. 90–106
Metode Penelitian	Systematic Review mengikuti pedoman PRISMA

2. Hasil Aanalis

Pendahuluan	Jurnal ini membahas pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam akuntansi sektor publik. Hal ini dipicu oleh masih adanya kasus korupsi, penyalahgunaan anggaran, kurangnya keterbukaan, serta tuntutan publik untuk pemerintahan yang lebih bersih dan profesional. Penulis menekankan bahwa transparansi merupakan syarat penting dalam demokrasi, sementara akuntabilitas berfungsi memastikan pengelolaan dana publik dilakukan secara bertanggung jawab.
Hasil	Penulis mengidentifikasi 5 mekanisme utama yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor public : <ol style="list-style-type: none">1. Regulatory Frameworks (IPSAS & GFS) Standar internasional terbukti meningkatkan kualitas dan keterbandingan laporan keuangan pemerintah, namun implementasinya tidak merata karena hambatan politik, ekonomi, dan kapasitas SDM

	<p>2. Auditing Practices, Audit internal dan eksternal meningkatkan kepercayaan publik dan membantu mendeteksi penyimpangan. Audit dianggap pilar utama governance yang baik.</p> <p>3. Digital Transformation & E-Government, Teknologi digital meningkatkan akses publik terhadap informasi keuangan secara real-time, tetapi tantangan seperti keamanan data dan rendahnya literasi digital masih terjadi.</p> <p>4. Stakeholder Engagement, Partisipasi publik melalui citizen oversight, public consultation, dan participatory budgeting meningkatkan transparansi dan relevansi informasi.</p> <p>5. Ethical Frameworks & Anti-Corruption Efforts Integritas organisasi, perlindungan whistleblower, dan kebijakan anti-korupsi diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.</p>
Kelebihan Kekurangan	<p>Kelebihan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Topik Relevan dengan Isu Pemerintahan Modern • Menggunakan Metode Systematic Review yang Terstruktur • Pembahasan Lengkap dan Komprehensif • Memuat Temuan dan Gap Penelitian • Relevan untuk Pembuat Kebijakan dan Peneliti <p>Kekurangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak Menyertakan Data Empiris Baru • Rentang Literatur Sangat Luas tetapi Tidak Semua Didalami • Belum Ada Perbandingan Implementasi Antar Negara

	<ul style="list-style-type: none"> • Tantangan Teknologi Baru Hanya Disebutkan Secara Singkat • Tidak Menampilkan Visual Pendukung
Kesimpulan	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas sektor publik dapat meningkat apabila pemerintah menerapkan Standar pelaporan global seperti IPSAS dan GFS, Audit internal dan eksternal yang kuat, Sistem pemerintahan digital dan akses data publik terbuka, Pelibatan warga negara dalam proses anggaran, Penegakan etika dan perlindungan anti-korupsi</p> <p>Penulis menekankan bahwa upaya peningkatan transparansi memerlukan pendekatan multidimensi, bukan hanya perubahan teknis, tetapi juga reformasi budaya birokrasi, pendidikan etika, dan investasi teknologi. Penelitian masa depan diharapkan mengeksplorasi lebih lanjut penggunaan Artificial Intelligence, Blockchain, dan Open-Government Systems sebagai inovasi menuju pemerintahan yang lebih transparan.</p>

Jurnal Internasional 2

1. Identitas Jurnal

Judul	Accountability in Village Government: The Role of the Internal Control System as Moderation
Penulis	Sesi Hidayati, Yesi Mutia Basri (corresponding author) dan Novita Indrawati
Institusi	Universitas Riau, Indonesia
Jurnal	Journal of Business and Social Review in Emerging Economies
Volume	Vol. 9, No. 2, Juni 2023. Halaman: 73–84
Metode Penelitian	Penelitian kuantitatif - SEM PLS

2. Hasil Analisa

Pendahuluan	Pembangunan antara wilayah urban dan rural. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di desa (12,36%) lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan (7,53%) pada tahun 2022. Untuk mengurangi disparitas tersebut, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada desa untuk mengelola sumber daya dan menerima alokasi dana desa dengan skala yang signifikan. Namun, peningkatan dana desa juga menimbulkan berbagai permasalahan akuntabilitas. Laporan dari Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa kasus korupsi dana desa menjadi kasus paling dominan pada tahun 2019, dengan kerugian negara mencapai Rp32,2 miliar. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam memastikan pengelolaan dana desa yang transparan dan bertanggung jawab.
--------------------	--

Hasil	<p>Dari penelitian tersebut didapatkan hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Semakin tinggi kemampuan teknis dan pengetahuan aparatur, semakin baik pertanggungjawaban dana desa. • Gaya kepemimpinan kepala desa memiliki efek positif terhadap akuntabilitas. Pemimpin yang komunikatif, motivatif, dan mampu mengontrol bawahan meningkatkan kinerja akuntabel. • Pemanfaatan teknologi informasi sangat kuat pengaruhnya terhadap akuntabilitas (koefisien terbesar). • Sistem Pengendalian Internal (SPI) memperkuat ketiga hubungan di atas. Artinya, tanpa SPI yang baik, kompetensi, kepemimpinan, dan TI tidak optimal menghasilkan akuntabilitas.
Kelebihan	<ul style="list-style-type: none"> • Kerangka teori kuat Menggunakan tiga teori utama: Resource-Based View, Stewardship Theory, Path-Goal Theory. • Metode analisis tepat (SEM-PLS) Cocok untuk model moderasi dan ukuran sampel menengah. • Kontribusi praktis jelas Penelitian memberi rekomendasi nyata

	<p>untuk pemerintah desa terkait peningkatan kompetensi, TI, dan internal control.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Validitas dan reliabilitas dipaparkan lengkap Mulai dari loading factor, AVE, composite reliability, hingga model fit. • Variabel moderasi yang relevan SPI memang krusial dalam akuntabilitas dana desa, sehingga novelty cukup baik.
Kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan lokasi terbatas Hanya satu kabupaten (Indragiri Hulu), sehingga generalisasi nasional masih terbatas. • Pengukuran menggunakan kuesioner self-assessment Berpotensi bias sosial karena responden adalah aparat desa yang dinilai. • Tidak membahas faktor eksternal Faktor seperti transparansi publik, partisipasi masyarakat, dan pengawasan eksternal tidak dianalisis. • Analisis kualitatif tidak ada Pendalaman wawancara bisa memperkaya interpretasi, tetapi penelitian ini murni kuantitatif. • Variabel TI cukup luas Indikator TI seperti penggunaan sistem informasi, internet, dan aplikasi desa masih terlalu umum.

Kesimpulan	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa dipengaruhi secara signifikan oleh tiga faktor utama, yaitu kompetensi aparatur desa, gaya kepemimpinan kepala desa, dan pemanfaatan teknologi informasi. Ketiga faktor tersebut terbukti memiliki kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) berperan penting sebagai variabel moderasi. SPI terbukti memperkuat hubungan antara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi aparatur : Akuntabilitas 2. Gaya kepemimpinan : Akuntabilitas 3. Pemanfaatan teknologi informasi : Akuntabilitas <p>Artinya, tanpa keberadaan SPI yang baik, ketiga faktor tersebut tidak akan secara optimal meningkatkan akuntabilitas desa. Penelitian juga menegaskan bahwa implementasi SPI di desa, sebagaimana diatur dalam regulasi seperti PP No. 60 Tahun 2008, sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM, penguatan kepemimpinan, optimalisasi teknologi informasi, serta pengawasan internal yang lebih kuat merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah yang hanya melibatkan satu kabupaten, sehingga disarankan penelitian selanjutnya memperluas area</p>
-------------------	---

	<p>kajian dan menambah variabel lain seperti transparansi dan partisipasi masyarakat.</p>
--	---

CONTOH LAPORAN KEUANGAN

LRA Pekon Sinar Waya tahun 2024

Jenis laporan	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes
entitas	Pemerintah Pekon Sinar Waya, Kec. Adiluwih, Kab. Pringsewu, Lampung
Periode	Tahun anggaran 2024
Sumber data	Website resmi Desa
Ringkasan Data	Jika dilihat dari Laporan realisasi tahun 2024, pekon sinarwaya menunjukkan kinerja anggaran cukup disiplin. Dari sisi pendapatan, desa berhasil merealisasikan sebanyak Rp1,27 Miliar (101,05% dari target). Sementara dari sisi belanja, desa menghabiskan Rp1.17 Miliar (95,93% dari pagu anggaran).hal ini menunjukkan penyerapan anggaran yang bisa dikatakan cukup optimal tidak terlalu rendah, namun masih ada anggapan dari laporannya. Dan hal itu akan dijelaskan di analisis selanjutnya.
1. analisis varians pendapatan (revenue Variance analysis)	Secara agregat kinerja pendapatan pekon sinar waya sangat baik dengan realisasi mencapai 101,05% dari target. Namun, jika dibedah perkomponen, terdapat ketimpangan struktural yang ekstrem. Karna apa, karna PADes yang terealisasi hanya sekitar 1,8 juta menunjukkan fenomena Fiscal Illusion, dimana desa itu terlihat kaya, padahal kenyataanya itu adalah penerimaan transfer pusat, bukan hasil keringat sendiri. Secara khusus, kontribusi BUMDes hanya Rp125.000 dalam satu tahun buku adalah indikator Lampu Merah. Ini menunjukkan aset desa tidak produktif atau manajemen BUMdes mati suri, tidak dikelola dengan smestinya dna mencari peluang untuk itu.



2. analisis efektivitas Belanja

Dan jika dilihat dari kualitas belanja (spending quality) bisa dikatakan positif karena memenuhi prinsip pro-Growth. Hal ini dibuktikan dengan dominasi Belanja dibidang pelaksanaan pembangunan pekon sebesar 93,88%. Karna dalam teori akuntansi publik, belanja modal memiliki multiplier effect, bagi ekonomi warga karena berupa pembangunan fisik csebagai contoh seperti jalan, irigasi, gedung, dll. Desa Sinar waya berhasil menghindari jebakan birokrasi umum dimana belanja pegawai seringkali menghabiskan 60-70% anggaran. Efisiensi belanja sebesar 95,52% juga menunjukan perencanaan yang matang (tidak overspending tapi juga tidak menumpuk uang).

5 BELANJA					
5.1	Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon	471.563.694,16	460.391.264,16	11.172.430,00	97,63%
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon	609.412.427,00	572.128.127,00	37.284.300,00	93,88%
JUMLAH BELANJA		1.080.976.121,16	1.032.519.391,16	48.456.730,00	95,52

3. analisis rasio Kemandirian Keuangan daerah

Jika dihitung menggunakan rumus Rasio Kemandirian, tingkat kemandirian Pekon Sinar Waya berada di angka 0,14%. Dan menurut klasifikasi kemandirian keuangan, angka tersebut 10% masuk kedalam kategori Instruktif. Yang artinya desa ini secara finansial tidak mampu melaksanakan otonomi tanpa instruksi dan bantuan dana dari pemerintah pusat. Ini jadi risiko jangka panjang, jika dana desa dari pusat

	<p>dihentikan atau dikurangi, operasional desa ini akan lumpuh total. Maka dari itu diusahakan semua desa tidak hanya didesa Sinarwaya ini harus memanajemen uang dan menjari peluang untuk mendapatkan pendapatan sebagai penujang keuangan desa jangan hanya bergantung kepada pusat saja.</p>
4. critical Point Akuntabilitas & transparansi	<p>Pemuatan LRA di website resmi desa dan pembuatan Banner di desa Sinar waya adalah salah satu praktik implementasi Good governance yang patu diapresiasi. Hal ini memenuhi standar Pemedagri no. 20 Tahun 2018 tentang Transparansi keuangan Desa. Namun, transparansi pelaporan ini belum diimbangi dengan transparansi kinerja bisnis BUMdes. Disarankan agar kedepannya catatan atas laporan keuangan (CaLK) lebih merinci mengapa hasil usaha BUMDes sangat minim. Dan kenapa sangat bergantung terhadap pembiayaan pusat.</p>

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON ((APBP-Pekon)) TAHUN ANGGARAN 2024				
PEKON SINARWAYA KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU				
PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	
Pendapatan Asli Daerah				
Hasil Usaha Desa	125.000	125.000	0.00	
Pendapatan Transfer	1.264.853.614	1.277.859.847		
Dana Desa	820.807.000	820.807.000	0.00	
Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	20.885.214	28.382.694	13.006.233	
Alokasi Dana Pekon	423.161.600	423.161.400	0.00	
Bantuan Keuangan Kabupaten				
Pendapatan Lain-lain				
Bunga Bank	1.500.000	1.729.115.39	229.115.39	
JUMLAH PENDAPATAN	2.513.337.228,00	2.552.085.096,97	3.828.849,97	
BELANJA				
KODI	GRAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	471.563.094,13	460.891.254,16	-11.172.430,00	
Penyelenggaraan dan Sifat, Tuntutan	432.705.694,16	428.747.254,2	3.958.430,00	
Penyelesaian/penyelewatan Peraturan	22.566.000,00	22.566.000,0	0,00	
Sub Bidang Pertanahan	7.214.000,00		7.214.000,00	
2. BIDANG PELAKUANAN PEMBANGUNAN	609.412.827	572.128.127	-37.284.890	
Sub Bidang Kesehatan	88.043.900	88.043.900	0,00	
Penyelenggaraan Pusyandu (Makamah Ta	75.239.600	75.239.600	0,00	
Penyelenggaraan Pos Kesehatan dan Sos	12.824.300	12.824.300	0,00	
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ru	327.690.500	327.690.500	0,00	
Pembeliharaan Prasarana jalan desa (po	15.250.000	15.250.000	0,00	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	267.902.000	267.902.000	0,00	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	44.538.500	44.538.500	0,00	
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	67.628.600	65.344.300	2.284.300	
Pembeliharaan Sumber Air Bersih Milik Da	9.000.000	9.000.000	0,00	
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan	21.846.000	21.846.000	0,00	
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan	36.782.600	34.498.300	2.284.300	
Sub Bidang Perhubungan Komunikasi	126.049.427	91.049.427	35.000.000	
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	75.060.000	75.060.000	0,00	
Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan	36.882.500	36.882.500	0,00	
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	8.000.000	8.000.000	0,00	
Operasional LPM	5.000.000	6.000.000	1.000,00	
Operasional PKK	5.000.000	5.000.000	0,00	
Operasional KARANG TARUNA	1.000.000	1.000.000	0,00	
Operasional LINMAS	1.000.000	1.000.000	0,00	
4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	39.263.500	26.063.500	-0,00	
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Afara	64.288.500	64.288.500	0,00	
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	11.775.000	11.775.000	0,00	
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA	143.315.000	143.300.000	1.000,00	
Sub Bidang Keadilan Danurat	6.315.000	6.315.000	0,00	
Sub Bidang Keadilan Mendesak	136.800.000	136.800.000	0,00	
JUMLAH BELANJA	1.806.154.621,16	1.258.562.891,16	-547.771.730,00	
SURPLUS DEBITET	41.676.007,16	21.831.071,25	19.844.935,91	
PENGELUARAN				
Silpa Tabun Sebelimoaya	41.676.007,16	41.676.007,16	0,00	
JUMLAH PEMBAYARAN	41.676.007,16	41.676.007,16	0,00	
LEBIH/KURANG PENGELUARAN	-0	83.007.078,99	183.007.078,99	

Sinarwaya,
2025
KEPALA PEKON

TULIHADRI

LINK (3 Media Massa & LRA)

<https://jelajahekonomi.kontan.co.id/ekonomidesa/news/deklarasikan-dirinya-sebagai-desa-miliarde- ini-sumber-kekayaan-desa- sekapuk#:~:text=KONTAN.CO.ID%20%2D%20SEKAPUK,BUMDes%20yang%20memiliki%20mobil%20Xpander.&text=Your%20browser%20can't%20play%20this%20video.&text=An%20error%20occurred.,nilai%20tambah%20sebagai%20desa%20mandiri.>

<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7993160/korupsi-anggaran-desa-kades-tambakrejo-tulungagung-divonis-4-tahun-bui>

<https://sinarwaya-pringsewu.desa.id/artikel/2025/2/4/realisasi-apbdes-2024>

TIM PENYUSUN

Kelompok 6

- 1. Feby Yolanda s 2313031068**
- 2. Tria Febriana 2313031077**